



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacob telp. (0756) 21080 Fax (0756) 485207

PAINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 188.4 / 21 /DSPPrPA-PS/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN NAMA - NAMA STAKEHOLDER YANG TERLIBAT PADA
APLIKASI GOOGLE SPREADSHEET UNTUK OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DATA TERPILAH DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan data terpilah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Otomatisasi berbasis Teknologi Informasi (TI), perlu melaksanakan Aplikasi Google Spreadsheet berbasis Online;
- b. Bahwa untuk berfungsinya Aplikasi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menunjuk Tim sebagai pengelola Aplikasi Google Spreadsheet Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2014 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (LATSAR CPNS);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Nama - Nama Stakeholder yang Terlibat pada Aplikasi Google Spreadsheet untuk pengelolaan data terpilah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ada diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Painan

Pada tanggal : 19 Mei 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 188.4 / 21 / DSPP/PA-PS/2021

TANGGAL 19 Mei 2021

TENTANG

Penunjukan Nama - Nama Stekholder yang Terlibat pada Aplikasi Google Spreadsheet untuk Pengelolaan Data Terpilah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

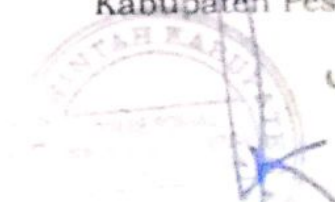
Nama - Nama Stekholder yang Terlibat pada Aplikasi Google Spreadsheet untuk Pengelolaan Data Terpilah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021:

NO	NAMA STEKHOLDER
1	2
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
12.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
13.	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan
14.	Kepolisian Resor (POLRES) Pesisir Selatan
15.	Pengadilan Negeri Painan
16.	Kementerian Agama
17.	Sekretariat DPRD

18.

Kejaksaan Negeri

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan


ZULFIAN APRIYANTO, S.H, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002